

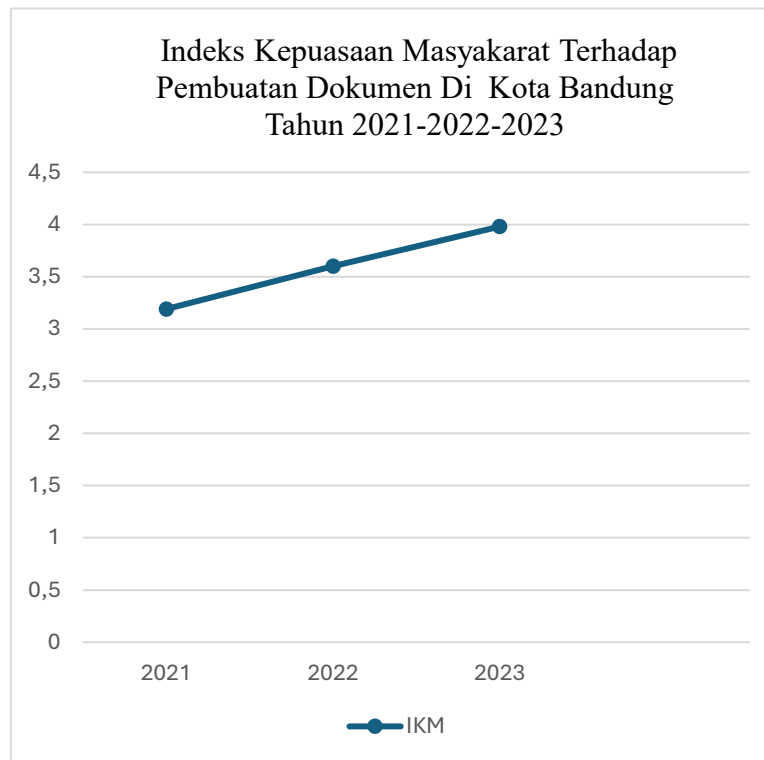
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Bandung meluncurkan sebuah inovasi pelayanan digital berupa SIPAKU (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu) merupakan sebuah aplikasi inovatif yang didedikasikan untuk menunjang proses pelaksanaan pelayanan publik (Nugraha et al 2023). Aplikasi ini dikembangkan sebagai respons terhadap tata kelola pelayanan kewilayahan yang dinilai belum efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung meluncurkan SIPAKU yang dirancang untuk menyediakan pelayanan yang cepat, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat, serta distandardisasi untuk sistem informasi pelayanan administrasi kewilayahan (Gustianto & Nurdianto, 2024). SIPAKU menawarkan mekanisme bagi warga untuk memantau status permohonan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), surat waris, dan KTP EL, melalui platform daring yang terintegrasi dengan WhatsApp. Implementasi aplikasi ini mencakup seluruh kecamatan di Kota Bandung dengan tujuan memperlancar administrasi

Aplikasi SIPAKU mulai beroperasi sejak tahun 2018 dengan implementasi awal di Kecamatan Sukasari. Pada tahun 2020, pengelolaan aplikasi ini dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, yang kemudian memperluas penerapannya ke berbagai kecamatan dan kelurahan. berawal dari surat edaran walikota nomor 489/SE.041-Diskominfo dan surat edaran walikota nomor 102/Diskominfo /2022 yang dimana didasarkan pada peraturan pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik. kepala Diskominfo Kota Bandung menyatakan bahwa pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan di tingkat kewilayahan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, serta transparan. Dengan sistem yang terintegrasi, SIPAKU diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan (Fadhilah & Alamsyah, 2024).



Gambar 1. 1 Indek Kepuasan Masyarakat

Sumber: jabarprov.go.id

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kota Bandung terkait pelayanan publik, termasuk pembuatan dokumen, menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, skor IKM mencapai 3,19, kemudian meningkat menjadi 3,6 pada tahun 2022, yang mengindikasikan peningkatan kualitas layanan yang signifikan. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan IKM mencapai 3,98, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 3,5. Meskipun data untuk tahun 2024 belum tersedia, survei kepuasan masyarakat terus dilakukan secara berkala untuk menyalakan layanan publik. Peningkatan skor IKM ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam memperbaiki pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Bustomi, 2016).

Berdasarkan data indeks kepuasan masyarakat (IKM) menjelaskan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung tahun 2021 ke tahun 2023. Ditetapkan dalam RPJMD, menunjukkan keberhasilan upaya perbaikan Pemerintah (Pemkot). Peningkatan ini dilatarbelakangi oleh penerapan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE) dalam

rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Meski pengawasan terus dilakukan untuk mengaktivasi layanan pada tahun 2024, tren positif pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Meskipun penerapan SIPAKU dapat meningkatkan Kualitas pelayanan publik, namun terdapat beberapa masalah yang disoroti berbagai aspek penerapan SIPAKU di Kota Bandung. Studi oleh (Bima Adityo, Engkus, & Faizal Pikri, 2022) adanya permasalahan miskomunikasi yang menyebabkan masyarakat lebih memilih bertanya langsung ke kecamatan daripada memanfaatkan aplikasi SIPAKU, yang berakibat pada inefisiensi pelayanan dan kurang optimalnya penyampaian informasi. Senada dengan temuan tersebut, penelitian di Kelurahan Babakan Sari. (A. Ahmad, Yunita, & Jovanscha Qisty Adinda F, 2024) kurangnya sosialisasi, kesalahan teknis pada situs web, dan keterlambatan pembaruan sebagai hambatan dalam pelayanan publik berbasis online melalui SIPAKU, meskipun terdapat dukungan dari inovasi, infrastruktur, dan SDM. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi secara berkala, memberikan arahan dari pegawai, dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah dan Diskominfo Kota Bandung. Di sisi lain, kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Mekarmulya. (Lestari, Eko Ginanjar, Sari, & Dwiyono Amir, 2022) menunjukkan bahwa tentang pelatihan SIPAKU kepada ketua RT dan RW dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang administrasi kependudukan, sehingga mereka dapat berperan sebagai agen sosialisasi kepada masyarakat.

Dari hasil Penelitian terdahulu ketiganya menyoroti tantangan serupa dalam implementasi SIPAKU di Kota Bandung berupa Kurangnya sosialisasi dan miskomunikasi menjadi isu utama yang menghambat sistem pemanfaatan oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan sistem teknis juga diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ketiga sepakat bahwa sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan, serta umpan balik dari masyarakat, penting untuk keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Sedangkan Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan SIPAKU di kecamatan panyileukan: integrasi sistem dan kualitas pelayanan, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Secara khusus, penelitian ini menyoroti sistem integrasi dan kualitas Sdm menjadi perhatian utama mengingat peran pentingnya dalam implementasi kebijakan sebagai komponen kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dan observasi awal pada tanggal 21 Februari 2025 di Kecamatan Panyileukan, teridentifikasi adanya tantangan dalam menjaga integritas sistem SIPAKU antara pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan ini dicabut pada kapasitas SDM

di tingkat daerah yang belum sepenuhnya memadai, yang ditandai dengan keterbatasan keterampilan teknis dan kurangnya pemahaman mendalam mengenai sistem SIPAKU. Kondisi ini menghambat kelancaran transfer data dan koordinasi antar instansi, sehingga implementasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu (SIPAKU) belum berjalan efektif meskipun dirancang untuk mempermudah pelayanan publik di tingkat kewilayahan. Akibatnya pemanfaatan pelayanan secara berani oleh masyarakat belum optimal, dan inovasi DISKOMINFO Kota Bandung dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga menghadapi kendala.

Kecamatan Panyileukan yang ingin mewujudkan kecamatan yang harmonis, menghadapi tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu (SIPAKU), sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pelayanan publik di tingkat kewilayahan (Pahlevi, 2017). Meskipun SIPAKU bertujuan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi serta meningkatkan kepuasan masyarakat, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya komunikasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat terkait aplikasi SIPAKU, hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang belum tersampaikan. Permasalahan tersebut membuat masyarakat kurang paham mengenai aplikasi tersebut. Selain itu, inovasi yang dilakukan DISKOMINFO Kota Bandung dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, masyarakat belum dapat memanfaatkan pelayanan yang disediakan secara online secara optimal, Permasalahan ini mengindikasikan adanya masalah integritas sistem dari pemerintah pusat ke daerah, yang menghambat efektivitas SIPAKU dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau di Kecamatan Panyileukan (Bima Adityo et al., 2022).

Efektivitas SIPAKU dalam memberikan pelayanan yang optimal masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mumpuni dalam menjalankan aplikasi SIPAKU. Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi, pemahaman dan keterampilan petugas kelurahan dalam mengoperasikan SIPAKU menjadi hambatan yang signifikan (Salsabilla, 2024). Hal ini diperparah dengan sosialisasi yang belum optimal, yang menyebabkan masyarakat kurang memahami manfaat dan cara penggunaan aplikasi, Akibatnya potensi SIPAKU sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik belum sepenuhnya terealisasi, dan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi yang seharusnya dapat dipermudah melalui sistem ini (Kepakisan, Triandini, & Suniantara, 2024). Berdasarkan observasi awal yang dilakukan

oleh peneliti ditemukan bahwa petugas kecamatan dinilai belum optimal dalam menjalankan sosialisasi SIPAKU karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang aplikasi ini . Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM menjadi krusial agar SIPAKU dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di kecamatan panyileukan

Urgensi kebijakan evaluasi publik SIPAKU semakin meningkat mengingat adanya tantangan integritas sistem pusat dan daerah, terutama yang disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya kompeten. Evaluasi menjadi krusial untuk mengidentifikasi keterampilan Sdm yang masih belum kompeten . Dengan mempelajari proses dan prosedur, kelemahan dalam sistem dapat terdeteksi, sehingga tindakan preventif dan perbaikan dapat segera dilakukan untuk meminimalisir risiko mengenai pengelola sdm di kecamatan panyileukan , juga dapat membantu memastikan bahwa sistem pusat dan daerah terintegrasi secara efektif, meminimalkan potensi konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat.(Pratiwi, Pati, & Pangemanan, 2022)

Selain itu, evaluasi kebijakan publik SIPAKU juga menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam implementasi sistem. Melalui evaluasi, kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM dapat diidentifikasi, sehingga program-program peningkatan kompetensi dapat dirancang dan dilaksanakan secara tepat sasaran. Peningkatan kompetensi SDM akan berdampak positif pada integritas sistem secara keseluruhan, karena SDM yang kompeten akan lebih mampu menerapkan SIPAKU secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga sebagai katalisator untuk perbaikan sistem dan peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan melalui SIPAKU.(Muhiddin, 2017)

Berdasarkan fenomena masalah mengenai integrasi sistem dan keterbatasan kualitas SDM dalam implementasi SIPAKU di Kecamatan Panyileukan, kedua faktor tersebut terbukti menghambat efektivitas pelayanan publik..Permasalahan tersebut menuntut kajian komprehensif guna mengidentifikasi akar masalah serta merumuskan solusi strategis. Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan yang ada, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi kebijakan SIPAKU secara mendalam. Sehingga, penelitian ini memiliki judul “ Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahaan terpadu (SIPAKU) di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan,diantaranya sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan sasaran kebijakan dan target penerima manfaat, terutama dalam sosialisasi penggunaan SIPAKU.
2. Miskomunikasi antara aparaturn pemerintah dan masyarakat, sehingga penerapan kebijakan menjadi ambigu.
3. Kendala teknis seperti kesalahan pada situs web dan keterlambatan pembaruan informasi yang menghambat akurasi data kinerja.
4. Kesulitan dalam mengumpulkan data valid (misalnya Indeks Kepuasan Masyarakat) untuk memonitor efektivitas kebijakan.
5. Keterbatasan kompetensi dan keterampilan teknis SDM di tingkat kecamatan yang mengurangi efektivitas operasional SIPAKU.
6. Hambatan integrasi antara sistem pemerintah pusat dan daerah yang mengganggu kelancaran transfer data dan koordinasi antarinstansi.
7. Evaluasi kebijakan yang belum mampu mengidentifikasi akar permasalahan secara komprehensif sehingga solusi perbaikan belum optimal.
8. Belum adanya rekomendasi strategis yang konkret untuk meningkatkan sosialisasi, perbaikan teknis, dan penguatan kapasitas SDM guna mendukung implementasi SIPAKU secara efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengkhususan (*specification*) Kebijakan SIPAKU di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
2. Bagaimana pengukuran (*measurement*) Kebijakan SIPAKU di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
3. Bagaimana analisis Kebijakan SIPAKU di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
4. Bagaimana rekomendasi Kebijakan SIPAKU DI Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pengkhususan (*specification*) Kebijakan SIPAKU di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
2. Mengetahui dan mendeskripsikan pengukuran (*measurement*) Kebijakan SIPAKU di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
3. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis Kebijakan SIPAKU di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
4. Mengetahui dan mendeskripsikan rekomendasi Kebijakan SIPAKU DI Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis yang dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Kegunaan Teoretis

- **Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan kerangka teori evaluasi kebijakan publik, khususnya terkait integrasi sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan publik. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji efektivitas implementasi aplikasi digital pemerintahan, sehingga memperkaya literatur dan memperluas wawasan tentang dinamika pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

- **Bagi Lembaga / Perguruan Tinggi**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar di bidang kebijakan publik, administrasi publik, serta manajemen teknologi informasi. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai dasar dalam pengajaran teori evaluasi kebijakan dan penerapan inovasi digital dalam pelayanan publik, serta sebagai contoh studi kasus untuk mendorong penelitian-penelitian lanjutan yang bersifat interdisipliner.

- **Bagi Instansi Terkait**

Bagi instansi pemerintah dan lembaga terkait, hasil penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi kebijakan SIPAKU. Dengan dasar teori yang kuat, penelitian ini membantu instansi dalam merumuskan strategi perbaikan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan

mengoptimalkan integrasi sistem antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepuasan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- Bagi Peneliti,

hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menyediakan kerangka metodologis dan analisis aplikatif untuk evaluasi kebijakan publik dan inovasi pelayanan digital. Temuan yang bersifat empiris ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada, tetapi juga membantu peneliti mengidentifikasi permasalahan operasional dan merumuskan solusi strategis yang dapat diuji lebih lanjut dalam studi lanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi referensi penting dalam mengkaji integrasi sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam konteks pelayanan publik.

- Bagi Perguruan Tinggi,

hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dan studi kasus dalam mata kuliah kebijakan publik, administrasi publik, dan manajemen teknologi informasi. Temuan penelitian memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan digital, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan teori evaluasi kebijakan dalam konteks praktis. Selain itu, penelitian ini mendukung pengembangan kurikulum yang berorientasi riset, mendorong kolaborasi antara akademisi dan praktisi, serta menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia pelayanan publik.

- Bagi Instansi Terkait,

penelitian ini menawarkan panduan praktis untuk menyusun strategi perbaikan dan optimalisasi implementasi SIPAKU dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Rekomendasi berbasis bukti yang dihasilkan membantu instansi mengidentifikasi hambatan operasional, memperkuat integrasi sistem antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan kapasitas SDM. Dengan penerapan strategi dan rekomendasi tersebut, instansi diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

F. Kerangka Berpikir

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengupayakan kebijakan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meluncurkan aplikasi SIPAKU (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu). Program ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi publik, khususnya di tingkat kecamatan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efisien, dan akuntabel. Sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, aplikasi SIPAKU dikembangkan sebagai respons terhadap tantangan dalam pelayanan kewilayahan yang belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Namun, penerapan SIPAKU di Kecamatan Panyileukan masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama terkait integritas sistem dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pertama, integritas sistem menjadi salah satu tantangan utama, karena koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyampaian informasi kepada masyarakat melalui aplikasi ini belum berjalan optimal. Sebagai hasilnya, meskipun sistem dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, implementasinya masih kurang terintegrasi dengan baik, yang berakibat pada inefisiensi pelayanan. Kedua, kualitas SDM yang terlibat dalam implementasi SIPAKU juga menjadi kendala besar, mengingat keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknis petugas di tingkat kelurahan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang memadai, masyarakat dan petugas kelurahan kesulitan memanfaatkan aplikasi ini dengan optimal.

Pada penelitian awal, penulis menemukan adanya permasalahan serta menemukan adanya indikasi masalah mengenai evaluasi kebijakan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi kewilayahan Terpadu (SIPAKU) di kecamatan panyileukan kota bandung: integritas sistem antara pemerintah Pusat dan daerah serta kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan publik. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori (Jones, 2010) yang menyebutkan bahwa untuk melakukan evaluasi kebijakan suatu program dapat meliputi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Pengkhususan (*Specification*)

Pengkhususan merujuk pada proses pendefinisian secara rinci ruang lingkup dan komponen utama dari kebijakan yang akan dievaluasi. Proses ini bertujuan untuk meminimalisasi ambiguitas dengan menetapkan batasan dan mendefinisikan secara jelas masalah serta tujuan kebijakan, sehingga evaluasi dapat terfokus pada aspek-aspek kritis yang relevan. Selain itu, pengkhususan membantu menentukan elemen-elemen

spesifik yang perlu diukur dan dianalisis, serta memberikan dasar bagi penetapan variabel, indikator, dan parameter evaluasi yang sistematis dan terukur. Dengan demikian, pengkhususan berfungsi sebagai fondasi awal yang memastikan evaluasi kebijakan berjalan secara fokus dan relevan.

2. Pengukuran (*measurement*)

Pengukuran tahap di mana indikator-indikator kinerja kebijakan ditetapkan dan diukur secara objektif. Tahap ini mencakup identifikasi variabel kunci yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, serta penerapan metodologi kuantitatif dan kualitatif seperti analisis statistik dan survei untuk mengumpulkan data yang valid dan dapat dipercaya. Selain itu, pengukuran melibatkan penetapan standar atau benchmark sebagai tolok ukur untuk membandingkan kinerja kebijakan dalam periode atau konteks yang berbeda. Dengan demikian, pengukuran yang tepat memberikan gambaran akurat mengenai realisasi kebijakan serta perubahan yang terjadi akibat implementasinya.

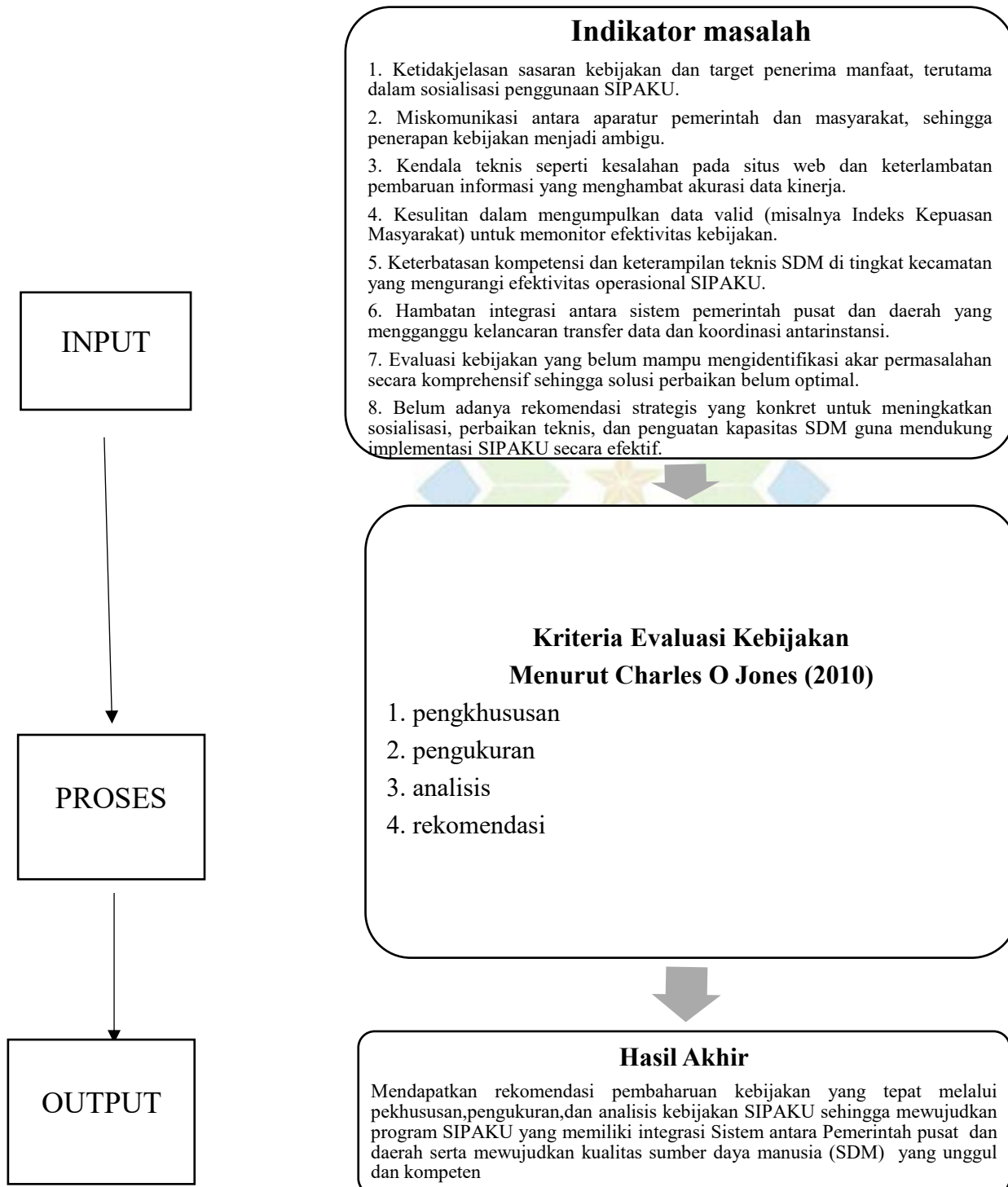
3. Analisis

Analisis merupakan tahap kritis di mana data yang telah dikumpulkan melalui pengukuran dikaji secara mendalam untuk mengungkap hubungan sebab-akibat antar variabel. Melalui penggunaan metode analitis, seperti cost-benefit analysis atau analisis statistik, evaluasi bertujuan untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Tahap ini juga berperan dalam mendeteksi kendala yang menghambat efektivitas kebijakan serta menemukan peluang untuk peningkatan implementasi di masa depan. Dengan pendekatan berbasis bukti, analisis memberikan dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perumusan kebijakan.

4. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan temuan dari tahap pengukuran dan analisis, dengan tujuan untuk menyempurnakan kebijakan melalui usulan perbaikan atau penyesuaian yang konstruktif. Rekomendasi berfungsi sebagai panduan tindakan bagi para pembuat kebijakan, menyediakan dasar untuk melakukan penyesuaian agar kebijakan dapat lebih responsif terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, proses penyusunan rekomendasi ini menutup siklus evaluasi dengan menghubungkan hasil evaluasi dengan perumusan kebijakan selanjutnya, sehingga tercipta umpan balik yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Berdasarkan Uraian diatas, maka kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil Penelitian (diolah Peneliti 2025))

